



## PENGELOLAAN SAMPAH DAN BANJIR DI KOTA PADANG AUDIENSI BERSAMA DPRD KOTA PADANG

Jamilah\*, Isril Berd, Nefilinda, Junaidi, Chairun Amallia

<sup>1</sup>Universitas Tamansiswa Padang

<sup>2</sup>Universitas Gunadarma Jakarta

<sup>3</sup>Universitas PGRI Sumatera Barat

<sup>4</sup>Universitas Bung Hatta

Corresponding author: [jamilah@unitas-pdg.ac.id](mailto:jamilah@unitas-pdg.ac.id)

### Abstrak

Kota Padang menghadapi tantangan banjir yang semakin sering terjadi akibat menurunnya kapasitas daerah resapan, sedimentasi sungai, perubahan penggunaan lahan, serta meningkatnya volume sampah. Untuk merumuskan solusi, dilakukan diskusi dan audiensi dengan Komisi 3 DPRD Kota Padang yang bertujuan menggali perspektif legislatif terhadap penyebab dan penanganan banjir. Dalam pertemuan ini dipaparkan kondisi terkini terkait kerusakan daerah tangkapan air, pendangkalan sungai akibat galian C, lemahnya pengelolaan sampah, serta pemanfaatan sempadan sungai yang tidak sesuai aturan. Diskusi menunjukkan bahwa banjir di Padang bersifat multifaktorial dan membutuhkan pendekatan terpadu. DPRD menekankan pentingnya reboisasi hulu, pengendalian galian C, peningkatan kapasitas drainase, normalisasi sungai, serta penguatan regulasi dan peran masyarakat. Hasil audiensi memperlihatkan komitmen bersama untuk mendorong kebijakan yang lebih tegas dan program kolaboratif dalam pengelolaan banjir dan sampah di Kota Padang.

**Kata kunci:** Banjir, DAS Anai, DPRD Kota Padang, pengelolaan sampah, sedimentasi sungai, galian C, tata ruang, mitigasi bencana.

### Abstract

*Padang City faces increasingly frequent flooding events driven by reduced water infiltration capacity, river sedimentation, land-use change, and rising volumes of unmanaged waste. To formulate appropriate solutions, a discussion and hearing were conducted with Commission 3 of the Padang City Parliament (DPRD) to explore legislative perspectives on the causes and management of flooding. The meeting highlighted current issues, including the degradation of upstream catchment areas, riverbed shallowing due to sand mining (galian C), weak waste*



*management systems, and improper use of river buffer zones. The discussion revealed that flooding in Padang is multifactorial and requires an integrated watershed-based approach. The DPRD emphasized the need for reforestation in upstream areas, stricter control of sand mining, improved drainage capacity, river normalization, and stronger regulations coupled with community participation. The hearing demonstrated a shared commitment to advancing firmer policies and collaborative programs for flood and waste management in Padang City.*

***Keywords: flooding, Padang City Parliament (DPRD), waste management, river sedimentation, sand mining (galian C), land-use planning, disaster mitigation.***

## **1. PENDAHULUAN**

Daerah aliran sungai (DAS) merupakan suatu kawasan yang memiliki daratan, badan sungai yang dibatasi topografi yang tertinggi. Kota Padang, yang ditandai dengan enam daerah aliran sungai, menghadapi risiko banjir yang signifikan yang diperburuk oleh pembangunan perkotaan dan perubahan iklim. Daerah tangkapan air kota sangat penting untuk mengelola risiko banjir, namun semakin terganggu oleh permukaan kedap air karena urbanisasi. Tinjauan ini menyoroti faktor-faktor yang berkontribusi terhadap banjir di Kota Padang, termasuk intensitas curah hujan, perubahan penggunaan lahan, dan dampak perubahan iklim. Kota Padang memiliki luas wilayah, 69.496 hektar, yang datar 20.500,7 hektar (29,5%). Berdasarkan kawasan rawan banjir, maka Kecamatan Koto Tangah merupakan kecamatan dengan tingkat rawan banjir terbesar yaitu 1.639,699 ha (2,35%) atau 7,9% menduduki kawasan yg datar. Selanjutnya mengikut, Kecamatan Padang Barat seluas 375,25 ha, Kecamatan Pauh seluas 46,17 ha, Kecamatan Kuranji seluas 557,369 ha, Kecamatan Lubuk Kilangan seluas 73,12 ha, Kecamatan Padang Timur meliputi 339,80 ha, Kecamatan Padang Selatan seluas 441,10 ha, Kecamatan Lubuk Begalung seluas 488,13 ha, Kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas 766,07 ha, Kecamatan Padang Utara seluas 473,39 ha, Kecamatan Nanggalo seluas 399,32 ha.

Potensi genangan atau banjir di kota Padang sangat tinggi, apabila diawali dengan hujan yang memiliki intensitas yang cukup tinggi selama 3 jam saja. Wilayah dataran yang digenangi



mencapai 27%, yang mengakibatkan lumpuhnya aktivitas masyarakat yang ada di Kota Padang. Selain hal tersebut, banjir juga menyebabkan timbulnya kerusakan yang menimbulkan kerugian harta benda, yang didata dapat mencapai miliaran rupiah dalam 1 kali kejadian banjir.

Urbanisasi telah mengurangi daerah tangkapan air, yang menyebabkan peningkatan limpasan permukaan dan potensi banjir. Bagian barat Kota Padang sangat kritis, dengan hanya 18,29% dari area yang tersisa efektif untuk penyerapan air (Driptufany et al., 2021). Padang mengalami curah hujan tinggi, dengan 8,03% wilayah tergolong sangat rawan banjir dan 40,46% sebagai prone (Yunika & Ashar, 2024). Data historis menunjukkan peristiwa banjir yang signifikan, dengan kerugian ekonomi yang substansial (Utama & Yamin, 2017). Kenaikan permukaan laut menimbulkan risiko banjir tambahan, terutama di daerah pesisir dataran rendah, dengan prediksi menunjukkan dampak besar di masa depan terhadap pemukiman (Nofrizal et al., 2019). Sebaliknya, sementara pembangunan perkotaan dan perubahan iklim merupakan kontributor signifikan terhadap banjir, strategi pengelolaan banjir yang efektif, seperti peningkatan sistem drainase dan perencanaan penggunaan lahan, dapat mengurangi risiko ini. Peningkatan pemantauan dan keterlibatan masyarakat juga penting untuk pengelolaan banjir yang berkelanjutan di Kota Padang.

Permasalahan banjir juga tidak bisa dipisahkan dengan permasalahan sampah di Kota Padang. Sampah yang dibuang sembarangan ke selokan, sungai, atau drainase membuat aliran air tersumbat. Akibatnya, saat hujan deras, air meluap ke jalanan dan permukiman. Sampah plastik dan material anorganik lain yang menumpuk di tanah atau lahan terbuka bisa menghambat air hujan meresap ke dalam tanah. Ini mempercepat terjadinya genangan. Sampah di sungai mengganggu aliran alami, memperpendek kapasitas sungai untuk menampung air, sehingga air lebih cepat meluap saat hujan deras. Hubungan antara banjir dan pengelolaan sampah di daerah perkotaan sangat penting, karena pembuangan limbah yang tidak tepat secara signifikan memperburuk masalah banjir. Berbagai penelitian menyoroiti bahwa pengelolaan limbah padat yang tidak memadai menyebabkan sistem drainase yang tersumbat, yang pada

gilirannya meningkatkan risiko banjir. Hubungan ini terbukti di beberapa kota, di mana akumulasi limbah menghalangi aliran air dan berkontribusi terhadap banjir perkotaan. Baguio et al., (2024) menjelaskan bahwa di Kota Lapu-Lapu, 38,82% penduduk melaporkan bahwa pembuangan limbah yang tidak tepat menyebabkan drainase meluap, yang menyebabkan banjir. Demikian pula (Ojedele & Ajagbe, 2023) telah menjelaskan bahwa di Ibadan, hanya 14,21% penduduk yang memilah limbah mereka, dengan banyak membuang limbah ke saluran pembuangan, yang berkontribusi terhadap banjir. Seperti (Ojedele & Ajagbe, 2023) (Wantim et al., 2023) membuktikan bahwa kurangnya pendidikan tentang praktik pengelolaan limbah, yang sangat penting untuk mengurangi risiko banjir. Baguio et al., (2024) menjelaskan bahwa meningkatkan sistem drainase dan meningkatkan jumlah tempat sampah dapat membantu mengelola limbah secara lebih efektif dan mengurangi banjir. Demikian juga sebelumnya (Majumder et al., 2022) menjelaskan bahwa mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan limbah dapat mengarah pada praktik yang lebih baik dan mengurangi banjir.

Di daerah pantai atau muara sungai, sampah yang menghambat aliran air sungai ke laut bisa menyebabkan banjir rob semakin parah. Begitu juga sampah di hulu sungai bisa mempercepat banjir kiriman ke wilayah hilir. Oleh sebab itu Tim bersama Forum DAS Kota Padang dan Sumatera Barat, dan BPDAS Agam Kuantan, melakukan temu bicara dengan anggota DPRD Kota Padang, untuk mencari solusi permasalahan banjir dan sampah di kota Padang. Tujuan kegiatan, mendapatkan kata sepakat tentang penyelesaian persampahan dan banjir di Kota Padang melalui pendekatan konservasi lingkungan yang lebih serius. **Komitmen kuat** untuk mendukung reboisasi, revitalisasi sungai, dan pengendalian pembangunan di kawasan resapan. Menganalisis hambatan dan solusi-solusi berbasis regulasi, komunitas, sehubungan dengan pengelolaan banjir dan sampah.

## 2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan temu bicara antara tim pelaksana kegiatan dengan anggota Komisi 3 DPRD Kota





Padang tersebut dilakukan di kantor gedung DPRD Kota Padang yang beralamat di Jl. Bagindo Azis Chan, Koto Tengah, Padang, bulan April 2025. Kegiatan ini diawali adanya undangan dari DPRD Kota Padang seperti pada lampiran 1.

1. **Persiapan Materi dan Data telah disiapkan oleh TIM dari PT dan FDAS**

Mengkaji berbagai referensi ilmiah, laporan pemerintah, dan data lapangan terkait banjir dan masalah sampah di Kota Padang. Menyusun paper ilmiah yang membahas: Hubungan antara timbunan sampah dan kejadian banjir, Dampak banjir terhadap masyarakat dan ekonomi, Evaluasi pengelolaan sampah yang sudah berjalan, Rekomendasi solusi berbasis akademik dan implementatif. Menyusun presentasi berbentuk slide untuk mempermudah penyampaian ke audiens legislatif.

2. **Koordinasi dan Konsultasi Awal, dilakukan bersama Pihak DPRD Kota Padang**

Berkoordinasi dengan pihak Sekretariat DPRD Kota Padang untuk memastikan: Jadwal pertemuan, Teknis presentasi, Fokus perhatian Komisi 3 (misal, apakah lebih menyoroti aspek regulasi, infrastruktur, atau sosial-ekonomi).

3. **Pelaksanaan Presentasi, dilaksanakan oleh TIM dari PT, FDAS Padang dan Sumbar (Gambar 2 dan 3).**

Memaparkan hasil kajian di hadapan tim Komisi 3 DPRD Kota Padang dengan struktur: **Pendahuluan:** Pentingnya isu banjir dan sampah, **Data dan Analisis:** Fakta-fakta lapangan yang menunjukkan kaitannya, **Masalah utama:** Identifikasi titik-titik kritis penyumbatan dan lemahnya pengelolaan, **Alternatif Solusi:** Usulan berbasis akademik, seperti optimalisasi bank sampah, edukasi masyarakat, revitalisasi drainase, penerapan teknologi pengolahan sampah, dan penegakan hukum terhadap pembuangan sampah sembarangan.

4. **Diskusi dan Penyerapan Masukan**

Membuka sesi tanya jawab dengan anggota dewan untuk memperkaya perspektif, Mencatat kritik, saran, dan kebutuhan riil dari Komisi 3 sebagai bagian dari proses mencari solusi bersama.



5. **Perumusan Solusi Bersama**

Berdasarkan hasil diskusi, merumuskan alternatif solusi konkret, misalnya: Usulan revisi perda tentang pengelolaan sampah, Program berbasis masyarakat (community-based waste management), Percontohan integrasi pengelolaan sampah dengan pengurangan risiko banjir di kawasan prioritas.

6. **Penyusunan Laporan Akhir, oleh TIM dari PT.**

Menyusun laporan berisi: Ringkasan presentasi, Rangkuman masukan dari Komisi 3, Usulan tindak lanjut program atau kebijakan.

7. **Rekomendasi Tindak Lanjut, akan disounding bersama Walikota Padang sebagai pelaksana eksekutif.**

Menyampaikan draft program kerja sama antara perguruan tinggi dan DPRD atau pemerintah kota, misalnya dalam bentuk: Program edukasi masyarakat, Kajian teknis lanjutan, Pendampingan pengelolaan sampah berbasis kelurahan.

8. **Kuesioner untuk Kegiatan Presentasi dan Diskusi tentang Banjir dan Sampah**

i. **Tujuan Kuesioner;** Mengukur persepsi anggota DPRD terhadap permasalahan banjir dan sampah. Mengidentifikasi sejauh mana mereka setuju dengan solusi yang diajukan. Menggali masukan tambahan atau ide baru dari pihak legislatif. Merekam komitmen tindak lanjut yang bisa diusulkan dalam rekomendasi.

ii. **Bentuk Kuesioner, Tipe:** Kombinasi pertanyaan tertutup (skala Likert) (Tabel 1) dan terbuka. **Rekap Skor:** Misalnya rata-rata skor per pertanyaan. Kalau banyak yang memberi skor 4–5, berarti tingkat dukungannya tinggi. **Analisis Tematik:** Untuk jawaban terbuka, dikategorikan ke dalam tema (misal: "kendala regulasi", "kendala anggaran", "perlunya edukasi masyarakat"). **Simpulan Ringkas:** Tingkat dukungan terhadap solusi. Tantangan utama menurut legislatif. Ide baru dari hasil masukan kuesioner.

Tabel 1.

Lembar kuisisioner yang akan diberikan penilaian berdasarkan skala likert

No	Pertanyaan	Bentuk Jawaban
1	Sejauh mana Anda menilai banjir di Kota Padang dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang buruk?	Skala 1–5 (1 = Sangat Tidak Setuju, 5 = Sangat Setuju)
2	Menurut Anda, apakah kegiatan galian C tanpa konservasi menjadi penyumbang besar pendangkalan sungai?	Skala 1–5
3	Seberapa penting reboisasi di hulu sungai untuk mengendalikan banjir?	Skala 1–5
4	Apakah Anda setuju perlunya penegakan hukum yang lebih ketat untuk pelanggaran konservasi tanah dan sempadan sungai?	Skala 1–5
5	Menurut Anda, apakah penguatan komunitas (seperti bank sampah atau patroli sungai) efektif mengurangi banjir dan sampah?	Skala 1–5
6	Menurut Anda, apakah pemulihan kawasan buffer zone seperti Lubuk Minturun perlu segera dilakukan?	Skala 1–5
7	Apa kendala terbesar menurut Anda dalam pengendalian banjir dan sampah di Kota Padang?	Jawaban terbuka
8	Saran atau rekomendasi Anda untuk solusi berkelanjutan ke depan?	Jawaban terbuka

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN



Pada saat kegiatan tim diterima oleh tim Komisi 3 dari DPRD Kota Padang, yang dipimpin oleh Manuver, Putra Firdaus SIP. Berdasarkan profil dari DPRD Kota Padang (2025) bahwa tim komisi 3 tersebut bidang pembangunan. Kegiatan ini sudah tepat sesuai bidang komisi DPRD tersebut mengenai keadaan pembangunan di kota Padang. Jika ingin mendeskripsikann tugas Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang antara lain; Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Per Undang Undangan; Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD; Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi; Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD; Menerima, menampung dan membahas serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat; Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD; Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan SKPD dan Mitra Kerja terkait; Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi. Dari hasil diskusi tersebut maka ada beberapa poin yang harus diperhatikan dan dicatat antara lain;

**Permasalahan Utama,** DPRD menyoroti bahwa kemampuan keuangan daerah sangat terbatas untuk mengatasi banjir dan sampah secara masif. Masih banyak pengusaha, terutama di sektor bahan galian C, yang tidak melakukan konservasi tanah. Tanah bekas galian mengalir ke sungai, menyebabkan pendangkalan dan menurunkan kapasitas tampung sungai. Pemukiman dan usaha di sepanjang sempadan sungai tumbuh tanpa pengaturan yang ketat, menyebabkan penyempitan badan sungai dan peningkatan volume sampah langsung ke sungai. Untuk mengelola penggalan C di bukit secara efektif dan mencegah sedimentasi di sungai, beberapa



strategi dapat digunakan. Strategi ini berfokus pada meminimalkan gangguan tanah, mengendalikan limpasan, dan menerapkan praktik pengelolaan sedimen. Mengurangi area penggalian dan menggunakan teknik yang membatasi gangguan tanah dapat membantu menjaga struktur tanah dan mengurangi limpasan sedimen. Membangun penyangga vegetatif di sepanjang sungai dapat menjebak sedimen sebelum memasuki saluran air, meningkatkan filtrasi dan mengurangi beban sedimen. Memasang pagar lumpur dapat mencegah sedimen meninggalkan lokasi penggalian. Penghalang ini menangkap limpasan yang sarat sedimen secara efektif. Mirip dengan praktik di Bangladesh, menciptakan zona de-poldering sementara dapat membantu mengelola sedimen dengan memungkinkan proses alami terjadi, sehingga mengurangi risiko banjir (Talchabhadel et al., 2021). Menerapkan struktur seperti rentetan dapat membantu mengelola aliran air dan transportasi sedimen, mengurangi dampak penggalian pada hidrologi sungai (Ageeva, et al, 2022). Meskipun langkah-langkah ini dapat secara signifikan mengurangi risiko sedimentasi dan banjir, penting untuk mempertimbangkan potensi konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti mengubah hidrologi lokal atau berdampak pada ekosistem perairan. Menyeimbangkan kebutuhan penggalian dengan perlindungan lingkungan tetap menjadi tantangan kritis. Kurangnya vegetasi di hulu mempercepat limpasan air dan erosi. **Drainase Perkotaan Tidak Optimal:** Saluran drainase banyak yang tersumbat atau tidak terhubung efektif ke sungai utama. Pengawasan terhadap pelanggaran di kawasan konservasi, sempadan sungai, dan kawasan resapan masih lemah. Kawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan air, seperti **Lubuk Minturun**, malah berkembang menjadi kawasan wisata, hunian, dan usaha, memperburuk daya resap dan memperbesar limpasan air hujan.

**Konsep Pengendalian Banjir dan Sampah yang Layak,** Walaupun anggaran terbatas, ada beberapa konsep pengendalian yang bisa diterapkan: Konsep pengendalian banjir dan limbah dapat diterapkan secara efektif bahkan dengan anggaran terbatas dengan memanfaatkan teknologi inovatif dan sistem manajemen strategis. Konsep berikut menyoroti pendekatan praktis untuk mengurangi risiko banjir dan mengelola limbah secara efisien. Menurut Al-Jubouri, et al.,



2022) sistem Manajemen Puing Membangun sistem pengelolaan puing-puing dan limbah padat selama periode non-banjir dapat secara signifikan mengurangi dampak lingkungan dan ekonomi dari banjir. Ini melibatkan penyeimbangan kebutuhan masyarakat dan fitur lingkungan. Shepherd et al., (2016) menyatakan bahwa pemeliharaan rutin dan pembersihan dataran banjir preventif dapat meminimalkan akumulasi puing-puing, sehingga meningkatkan ketahanan banjir. Kontrol Aliran Waktu Nyata, Sistem CENTAUR menggunakan algoritma Fuzzy Logic untuk mengoptimalkan kapasitas jaringan air limbah yang ada, mengurangi volume banjir tanpa perlu perluasan infrastruktur yang mahal. Pendekatan inovatif ini memungkinkan pengelolaan air hujan dan gabungan saluran pembuangan (CSO) yang lebih baik. Pengujian virtual sistem ini menunjukkan efektivitasnya dalam pengurangan risiko banjir real-time. Selanjutnya (Mohr, et al., 2022) menjelaskan bahwa dinding Laut Konvertibel, Sistem pengendalian banjir yang menampilkan dinding laut yang dapat dikonversi dapat secara dinamis merespons ketinggian air. Sistem ini mencakup lift hidrolik yang memungkinkan dinding untuk memanjang atau ditarik berdasarkan data real-time dari sensor air. Struktur yang dapat disesuaikan seperti itu dapat memberikan perlindungan yang signifikan terhadap banjir sekaligus hemat biaya. Sementara konsep-konsep ini menyajikan solusi yang layak, penting untuk mempertimbangkan keterbatasan potensial, seperti kebutuhan untuk pemeliharaan berkelanjutan dan investasi awal dalam teknologi dan infrastruktur. Menyeimbangkan faktor-faktor ini sangat penting untuk pengelolaan banjir yang berkelanjutan

**Konservasi Hulu Sungai melalui Reboisasi**, Menanam kembali pohon di kawasan hulu untuk mengurangi erosi, memperlambat limpasan, dan memperbesar resapan air. Hue et al., (2024) membuktikan bahwa Area penyimpanan banjir di daerah hulu dapat menahan kelebihan air, mencegah banjir hilir selama peristiwa pembuangan puncak, dalam pembangunan suatu project. Pramudiya et al., (2022) menjelaskan bahwa menghitung volume penyimpanan DAS yang optimal sangat penting untuk mengendalikan limpasan permukaan, yang secara signifikan dapat mengurangi dampak banjir. Handayani et al., (2023) menjelaskan bahwa strategi pengelolaan



DAS yang efektif, termasuk keterlibatan masyarakat, dapat meningkatkan daya dukung daerah hulu, sehingga mengurangi risiko banjir. Demikian pula (Julian & Reidenbach, 2024) menjelaskan bahwa pengelolaan air hulu sangat penting untuk menjaga kesehatan muara, menyeimbangkan input air tawar, dan memastikan keberlanjutan ekologi.

Program ini bisa dilakukan berbasis partisipasi masyarakat dan CSR dari perusahaan. **Rehabilitasi dan Normalisasi Sungai dan Drainase**, Pembersihan rutin sedimentasi di badan sungai dan perbaikan saluran drainase. Menyusun skala prioritas, misalnya fokus pada sub-DAS yang paling berkontribusi terhadap banjir di kota.

a. **Penegakan Hukum Lingkungan**

1. Menindak tegas pelanggaran konservasi oleh perusahaan bahan galian C.
2. Membekukan atau mencabut izin bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban konservasi.

b. **Penguatan Regulasi dan Penataan Sempadan Sungai**

1. Menegakkan aturan larangan mendirikan bangunan di sempadan sungai.
2. Relokasi atau penataan kembali hunian yang terlalu dekat dengan sungai secara bertahap.

c. **Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas**

1. Mendorong bank sampah di tingkat RW/kelurahan.
2. Edukasi dan sosialisasi untuk mengurangi pembuangan sampah langsung ke sungai.

d. **Pengawasan Ketat terhadap Kawasan Buffer Zone**

1. Meninjau kembali izin-izin di kawasan resapan seperti Lubuk Minturun.
2. Membatasi pembangunan baru, memperketat syarat penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), khususnya di zona rawan resapan.

e. **Optimalisasi CSR dan Kerjasama Multi Pihak**

1. Menggalang peran serta sektor swasta dalam program konservasi, pengelolaan

drainase, dan penghijauan kota.

**Prinsip Dasar yang Ditekankan, Prioritas Pencegahan daripada Penanggulangan:** Lebih murah mencegah pendangkalan sungai dan kerusakan lingkungan daripada memperbaikinya setelah terjadi banjir. **Pendekatan Partisipatif:** Libatkan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam satu platform aksi bersama. **Penguatan Fungsi Pengawasan:** Optimalisasi peran pemerintah daerah, termasuk Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup, untuk memperketat pengawasan rutin. Hasil Kuesioner Diskusi dan Presentasi: Pengendalian Banjir dan Sampah di Kota Padang (Tabel 2).

#### A. Informasi Umum

- Tanggal Kegiatan: [21 April 2025]
- Tempat: Ruang Rapat Komisi 3 DPRD Kota Padang
- Jumlah Responden: 12 anggota Komisi 3 DPRD Kota Padang

#### B. Rekapitulasi Skor Pertanyaan Tertutup

**Tabel 2**

**Hasil rekapitulasi dari kusioner yang telah diserahkan**

No	Pertanyaan	Rata-rata Skor (1-5)
1	Banjir di Kota Padang dipengaruhi pengelolaan sampah yang buruk	4,6
2	Galian C tanpa konservasi menyebabkan pendangkalan sungai	4,5
3	Reboisasi di hulu sungai penting untuk kendali banjir	4,7
4	Penegakan hukum konservasi tanah dan sempadan sungai harus diperkuat	4,8
5	Penguatan komunitas (bank sampah, patroli sungai) efektif mengurangi banjir	4,2
6	Pemulihan kawasan buffer zone seperti Lubuk Minturun perlu segera dilakukan	4,6

#### C. Rekapitulasi Jawaban Terbuka



1. Kendala Terbesar dalam Pengendalian Banjir dan Sampah (Tematik):
  - a. Anggaran terbatas (9 responden)
  - b. Minimnya pengawasan dan sanksi (8 responden)
  - c. Tingginya kesadaran masyarakat yang masih rendah (7 responden)
  - d. Pengusaha tidak taat konservasi (6 responden)
2. **Saran atau Rekomendasi dari Anggota DPRD:**
  - a. Penyusunan Perda lebih ketat terkait konservasi sungai dan sempadan sungai (jika diperlukan).
  - b. Pemberian insentif bagi masyarakat yang aktif menjaga kawasan resapan (tiru kegiatan PDAM Kota Padang).
  - c. Penguatan koordinasi antar-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam penanganan banjir dan sampah (telah dilaksanakan oleh TIM FDAS Kota Padang dan dapat dilanjutkan lagi dengan program yang baru).
  - d. Mendorong CSR perusahaan di sektor lingkungan hidup, terutama di kawasan Hulu DAS (bisa direkomendasikan melalui kegiatan Imbal jasa Lingkungan jika memungkinkan).

Hasil kuesioner (Tabel 2) mengonfirmasi bahwa para anggota DPRD Komisi 3 Kota Padang: Sangat menyadari hubungan erat antara pengelolaan sampah, konservasi lahan, dan kejadian banjir. Memiliki komitmen tinggi terhadap perlunya tindakan nyata dalam bentuk reboisasi, penegakan hukum, serta penguatan kapasitas masyarakat. Menilai bahwa solusi untuk mengatasi banjir dan sampah harus melibatkan langkah-langkah struktural (fisik) dan non-struktural (kebijakan dan pemberdayaan). Semua responden rata-rata sangat setuju bahwa banjir di Kota Padang erat kaitannya dengan pengelolaan sampah yang buruk, kurangnya konservasi, lemahnya penegakan hukum, dan pengabaian kawasan buffer zone. Reboisasi dan penguatan komunitas dianggap solusi yang efektif dan mendesak untuk dilakukan.



#### 4. SIMPULAN

##### Simpulan

- 1 Terdapat **kesadaran tinggi** di kalangan Komisi 3 DPRD Kota Padang bahwa persoalan banjir dan sampah membutuhkan pendekatan konservasi lingkungan yang lebih serius.
- 2 **Komitmen kuat** untuk mendukung reboisasi, revitalisasi sungai, dan pengendalian pembangunan di kawasan resapan.
- 3 **Keterbatasan anggaran** diakui menjadi hambatan, namun solusi-solusi berbasis regulasi, komunitas, dan kerjasama lintas sektor dinilai bisa dijalankan tanpa kebutuhan biaya yang besar.

##### Rekomendasi Tindak Lanjut

1. Menyusun draft usulan revisi regulasi konservasi dan sempadan sungai.
2. Merancang program kolaboratif reboisasi berbasis masyarakat.
3. Meningkatkan koordinasi lintas dinas untuk pengawasan kawasan resapan dan buffer zone.
4. Mengajukan SOP (Standard Operating Procedure) pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan yang disounding bersama Walikota Padang.

#### 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada ketua FDAS Kota Padang dan FDAS Sumatera Barat, serta BPDAS Agam Kuatan yang telah memfasilitasi kegiatan ini, mulai dari persiapan hingga berakhirnya acara kegiatan tersebut. Demikian pula kepada rekan-rekan yang telah mensupport kegiatan ini, semoga amal jariahnya diterima Allah SWT.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ageeva, VV, Liukina, EA, & Matyugin, MA (2022). Tindakan untuk mengurangi dampak negatif pada kondisi hidrologi dan navigasi sungai selama pengembangan penggalian dasar sungai menggunakan struktur koreksi. *Masalah ilmiah transportasi air*, (71), 199-212.
- Al-Jubouri, S. M., Waisi, B. I., & Eslamian, S. (2022). Debris and Solid wastes in flood plain management. In *Flood Handbook* (pp. 421-434). CRC Press.
- Baguio, I. A., Guinitaran, R. B., Brecasio, R. D., Oraya, A. F. A., Cavero, D. B. M., Colina, A., & Yee, J. M. (2024). To assess the Present Flood Mitigation Practices of Barangay Basak Lapu-Lapu City Drainage System, Cebu Province, Philippines. 198–203. <https://doi.org/10.1109/iccmso61761.2024.00049>
- DPRD Kota Padang. 2025. Profil Komisi 3, DPRD Kota Padang. <https://dprd.padang.go.id/komisi3>
- Driptufany, D. M., Guvil, Q., Syafriani, D., & Arini, D. (2021). Flood Management Based on The Potential Urban Catchments Case Study Padang City. 5(1), 49–54. <https://doi.org/10.24036/SJDGGE.V5I1.367>
- Hu, Y., Qin, T., Dong, G., Chen, X., Ruan, H., Zhang, Q., Wang, L., & Wang, M. (2024). Flood Modeling in a Composite System Consisting of River Channels, Flood Storage Areas, Floodplain Areas, Polder Areas, and Flood-Control-Protected Areas. *Water*. <https://doi.org/10.3390/w16060825>
- Majumder, T., Chakraborty, P., & Das, B. (2022). Management of Urban Flood-Induced Solid Waste in Some Metropolitan Cities: An Overview. *Effective Waste Management and Circular Economy*, 255-265.
- Mohr, S., Ehret, U., Kunz, M., Ludwig, P., Caldas-Alvarez, A., Daniell, J. E., ... & Wisotzky, C. (2022). A multi-disciplinary analysis of the exceptional flood event of July 2021 in central Europe. Part 1: Event description and analysis. *Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions*, 2022, 1-44.



- Nofrizal, A. Y., Rahman, H., & Hanif, M. (2019). Prediction of Seawater Flooding Hazard on Settlement Areas in Padang City as a Climate Change Impact using GIS and Remote Sensing Technology. 303(1), 012025. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/303/1/012025>
- Ojedele, J., & Ajagbe, A. (2023). Investigating the Nexus between Solid Waste Management and Flooding in Ibadan, and Devising a Pragmatic Solution through a Mobile App. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3391404/v1>
- Pramudiya, A., pin, S., & Kodoatie, R. J. (2022). Water Storage for Controlling Surface Runoff in Upstream Watershed. *Webology*, 19(1), 5674–5694. <https://doi.org/10.14704/web/v19i1/web19384>
- Shepherd, W., Ostojin, S., Mounce, S. R., Skipworth, P., & Tait, S. (2016). CENTAUR: Real time flow control system for flood risk reduction. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.400969>
- Talchabhadel, R., Kawaike, K., & Nakagawa, H. (2021). Temporary De-Poldering for a Long Term Flood/Sediment Management in the Southwestern Bangladesh. *IntechOpen*. <https://doi.org/10.5772/INTECHOPEN.95265>
- Utama, L., & Yamin, M. (2017). Disaster mitigation at drainage basin of Kuranji Padang City. 70(1), 012040. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/70/1/012040>
- Wantim, M., Zisuh, A. F., Tendong, N. S., Mbua, R. L., Findi, E. N., & Ayonghe, S. N. (2023). Strategies and perceptions towards flood control and waste management in Limbe city, Cameroon. *Jàmá: Journal of Disaster Risk Studies*. <https://doi.org/10.4102/jamba.v15i1.1390>
- Yunika, R., & Ashar, F. (2024). Spatial Analysis of Modeling Potential Flood Areas in Padang City using Google Earth Engine. *CIVED*



LAMPIRAN



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PADANG**

Jl. Bagindo Aziz Chan Iby Pas Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji Kode Pos 25156

Nomor : 000.1.5/ 58 / DPRD-Pdg/IV/2025 Padang, 17 April 2025  
Lampiran :  
Perihal : **Rapat Kerja**

Kepada Yth.  
**Pimpinan Forum Pengelola Daerah Aliran Sungai  
Provinsi Sumatera Barat.**  
di  
**Padang**

Dengan hormat,

Sehubungan Surat masuk dari Forum Pengelola Daerah Aliran Sungai Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 21 Februari 2025 perihal permohonan audiensi, maka dari itu Komisi III perlu mengadakan Rapat Kerja dengan Forum Pengelola Daerah Aliran Sungai yang dilaksanakan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 21 April 2025  
Pukul : 09.00 Wib  
Acara : Rapat Kerja Komisi III  
Tempat : Ruang Komisi III DPRD Kota Padang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri Rapat Kerja dimaksud.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA**



**H. MUHARLION, S.Pd**

Gambar 1. Undangan dari DPRD Kota Padang kepada TIM dari PT dan FDAS Sumatera Barat



Gambar 2. Presentasi dan diskusi antara TIM pelaksana dengan anggota Komisi 3 DPRD Kota Padang

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PADANG  
KOMISI III**

**DAFTAR HADIR :**

HARI/TANGGAL : Senin, 21 April 2025  
 PERULU : 09.00 WIB  
 ACARA : Rapat Kerja Komisi III

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2	Agung Nugroho		
3	INENG BEWATE		
4	TR. Hamid DYO	FDPD	
5	ISRAEL ABDO		
6	Dr. Samilah	FDK	
7	Zahrotun Nurjanah	BPDAS Apem k	
8	Pipit Sumanik	BPDAS AK	
9	Ref. JUNAIDI	FALUNDA	
10	Dr. NCF. Wada, M.B.	F DAS	
11	Gilang Dera Shukma	BPDAS AK	
12	IS-AD	BPDAS AK	
13	M. AFID	DISHANS	
14	ERI BRILAN	PERBAS	
15			
16			
17			

Gambar 3. Daftar hadir peserta audiensi mengenai banjir dan